

Optimalisasi Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Optimalisasi Belanja
Daerah

Rima Hidayatul Fitri

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

E-Mail: rimahidayatul03@gmail.com

Fatmayanti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

E-Mail: fatmayanti@utu.ac.id

1

Submitted:

10 OCTOBER 2023

Accepted:

23 DECEMBER 2023

ABSTRACT

Expenditures in the budget realization report have great significance because they reflect the use of public funds obtained from regional taxes. The interest of the community as the party who contributes these funds through taxes, lies in the desire to assess the extent to which the use of these funds is in accordance with the objectives, effective, efficient and focused on the public interest. Spending analysis can be done using the spending variance ratio, spending growth ratio, spending harmony ratio and spending efficiency ratio. The aim of this research is to analyze regional spending performance through the variance ratio, growth, harmony and efficiency of regional spending at the Southwest Aceh Regency Financial Management Agency. This research is quantitative descriptive. Data was collected through documentation techniques. This research uses secondary data in the form of the Budget Realization Report of the Southwest Aceh Regency Financial Management Agency. The results of this research can be concluded that the calculation results of the spending variance ratio show good results with an average of -14.12%. The calculation results of the expenditure growth ratio show positive results with an average of 7.84%. The calculation results of the expenditure harmony ratio show that the operating expenditure results are an average of 63.12%, while for capital expenditure it is 24.14%. The calculation results of the shopping efficiency ratio show an average result of 86.39%, which means that if you look at the shopping efficiency criteria, it is included in the quite efficient category.

Keywords: Expenditure Variance, Expenditure Growth, Expenditure Compatibility, Expenditure Efficiency

ABSTRAK

Belanja dalam laporan realisasi anggaran memiliki signifikansi yang besar karena mencerminkan pemanfaatan dana publik yang diperoleh dari pajak daerah. Kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menyumbangkan dana tersebut melalui pajak, terletak pada keinginan untuk menilai sejauh mana penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan tujuan, efektif, efisien, dan terfokus pada kepentingan publik. Analisis belanja dapat dilakukan dengan menggunakan rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja belanja daerah melalui rasio varians, pertumbuhan, keserasian dan efisiensi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari rasio varians belanja menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata -14,12%. Hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata sebesar 7,84%. Hasil perhitungan dari rasio keserasian belanja menunjukkan hasil belanja operasi dengan rata-rata 63,12%, sedangkan untuk belanja modal sebesar 24,14%. Hasil perhitungan dari rasio efisiensi belanja menunjukkan hasil

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi

Kesatuan

Vol. 12 No. 1, 2024

pp. 1-11

IBI Kesatuan

ISSN 2337 – 7852

E-ISSN 2721 – 3048

DOI: 10.37641/jiakes.v12i1.2381

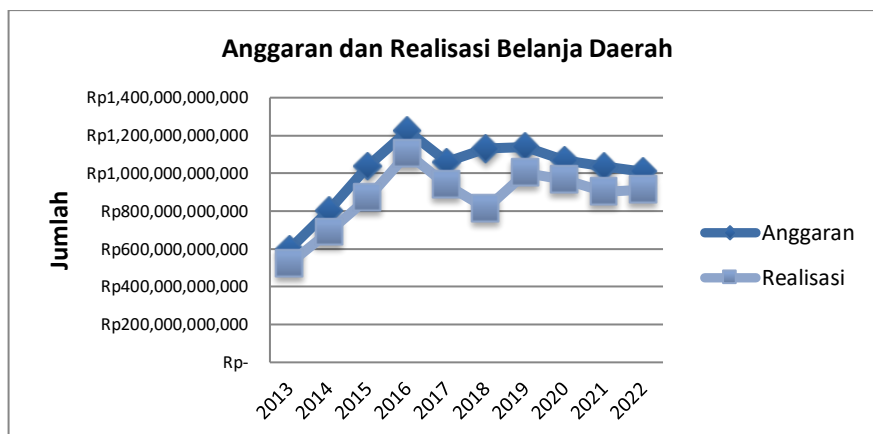
Kata kunci: Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Efisiensi Belanja

2

PENDAHULUAN

Otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya (Asmawati & Basuki, 2019; Kusumawardani et al., 2023). Setiap daerah diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari APBD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan perekonomian daerah, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pilat & Morasa, 2017). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan kepala daerah menyampaikan kepada DPRD rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, salah satunya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Amelia, 2022). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam tinjauan kinerja. Berdasarkan LRA, pembaca laporan dapat melakukan analisis kinerja laporan keuangan, termasuk analisis belanja (Saputra et al., 2020). Analisis belanja dapat dilakukan dengan menggunakan rasio varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.

Belanja dalam laporan realisasi anggaran memiliki signifikansi yang besar karena mencerminkan pemanfaatan dana publik yang diperoleh dari pajak daerah. Kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menyumbangkan dana tersebut melalui pajak, terletak pada keinginan untuk menilai sejauh mana penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan tujuan, efektif, efisien, dan terfokus pada kepentingan publik (Kannapadang, 2020). Belanja daerah yang terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Aceh Barat Daya telah berupaya menyeluruh dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Kabupaten Aceh Barat Daya dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam mengelola keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan belanja daerah. Untuk mewujudkan pembangunan daerah, Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyusun beberapa program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten tahun 2017-2022 yang di antaranya adalah pengembangan sektor produksi (kelautan, pertanian, dan perkebunan), syariat islam, penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, masih banyak indikator makro pembangunan di Aceh Barat Daya yang belum tercapai. Hal ini disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Aceh Barat Daya (2022) (Jati, 2019). Berikut adalah data realisasi belanja daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2013 sampai dengan 2022 yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.



Sumber: Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah (2013-2022)

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, dapat dilihat bahwa selama 10 tahun terakhir, anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami fluktuasi. Jumlah anggaran terkecil terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 598,835,610,57 dan jumlah anggaran terbesar tercatat pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp 1,224,428,806,902. Pada tahun 2018, terdapat penyerapan anggaran paling sedikit sebesar 67,58%, sementara tahun 2022 mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi sebesar 90,45%. Penelitian yang dilakukan Fatmahwati (2021) menunjukkan hasil analisis varians belanja yang dinilai baik, pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang positif, keserasian belanja menunjukkan alokasi belanja operasi yang lebih besar daripada belanja modal, serta efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Palimbong (2021), di mana rasio varians belanjanya tergolong baik, pertumbuhan belanja bersaldo negatif, keserasian belanja menunjukkan alokasi belanja modal yang lebih besar daripada belanja operasi, serta efisiensi belanjanya termasuk dalam kategori kurang efisien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja belanja daerah berdasarkan varians, pertumbuhan, keserasian dan efisiensi belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan rentang waktu penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi serta referensi khususnya mengenai analisis belanja berdasarkan varians, pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya

TINJAUAN PUSTAKA

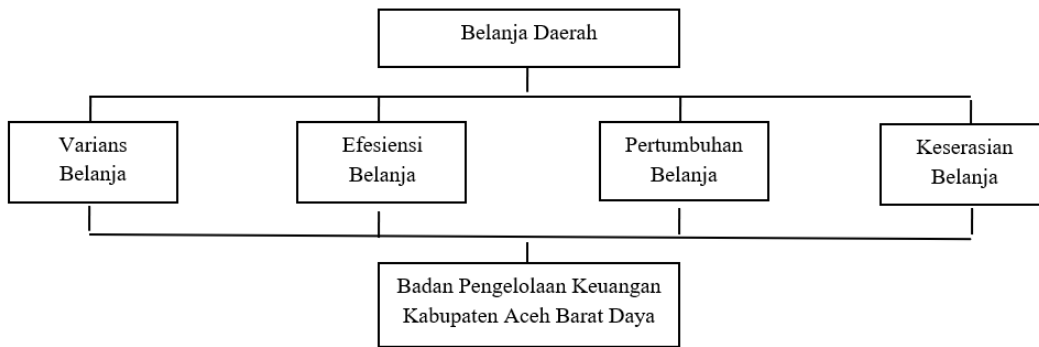
Penelitian ini menggunakan Teori Stewardship sebagai Grand Theory. Chrisman (2019) dan Schillemans & Bjurström (2020), menjelaskan bahwa dalam Teori Stewardship, pemerintah daerah (steward) sebagai entitas sektor publik diberikan kepercayaan untuk memenuhi aspirasi masyarakat (principal). Pemerintah daerah diharapkan dapat bertanggung jawab mengurus dan mengelola sumber daya yang dimiliki daerah serta bertindak untuk kepentingan publik dengan memenuhi tugas dan fungsinya dengan baik. Teori Stewardship menegaskan hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik (Asmawati & Basuki, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah melibatkan seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dilakukan secara sistematis, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kepatutan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari proses ini. Labi (2019) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) adalah perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan setiap tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya menjamin manfaat optimal bagi masyarakat dari APBD, tetapi juga meningkatkan citra kinerja pemerintah. Sebaliknya, pengelolaan keuangan daerah yang tidak memadai akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat penuh dari APBD dan berdampak buruk pada kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja didefinisikan sebagai pengeluaran dari Rekening Kas Umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran yang lebih dalam periode bersangkutan, yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah (Nugraheni & Subaweh, 2011). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kegunaan belanja adalah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan membiayai kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja terdiri atas belanja operasi, yang merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari dengan manfaat jangka pendek; belanja modal, yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi; belanja tidak terduga, yang diperuntukkan untuk keperluan darurat atau kejadian di luar anggaran yang telah dipersiapkan sebelumnya; dan belanja transfer, yang merupakan pengeluaran dari satu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang menyajikan rincian realisasi pendapatan, beban, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan. Laporan ini juga mencakup perbandingan antara masing-masing unsur tersebut dengan anggarannya dalam satu periode. LRA disusun dengan menggunakan metode akuntansi akrual sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Halim & Kusufi (2014) menjelaskan bahwa LRA adalah dokumen komprehensif yang merinci sumber dan alokasi dana yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat atau daerah. Dalam organisasi sektor publik, LRA memiliki arti penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana target yang sebelumnya telah disetujui oleh badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi dan dilaksanakan. Menurut Mahmudi (2016) dan Akhmadi & Sumardjoko (2017), analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk menilai seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah daerah dalam menggunakan APBD. Analisis belanja dapat dilakukan berdasarkan data yang ada pada LRA antara lain adalah analisis varians belanja dilakukan untuk menganalisis selisih antara realisasi belanja dengan anggaran, analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk menganalisis terhadap kenaikan atau penurunan masing-masing belanja selama periode tertentu, analisis keserasian belanja dilakukan untuk mengetahui keseimbangan belanja selama periode tertentu, analisis efisiensi belanja digunakan untuk mengetahui perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran.

Dalam penilaian kinerja belanja daerah dapat dilakukan dengan beberapa analisis yang meliputi analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi belanja. Hasil dari analisis tersebut dapat menjelaskan bagaimana kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengelola belanja daerahnya. dengan demikian, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang meliputi analisis varians, pertumbuhan, keserasian dan efisiensi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang mengumpulkan, menyusun dan menafsirkan data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui sumber yang sudah tersedia. Sumber data penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2013-2022. Alasan menggunakan rentang waktu selama 10 tahun agar dapat memberikan data yang lebih bervariasi serta dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya dan berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu menggunakan rumus dari Mahmudi (2016) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Thn} = \frac{\text{Realisasi belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belannja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belannja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

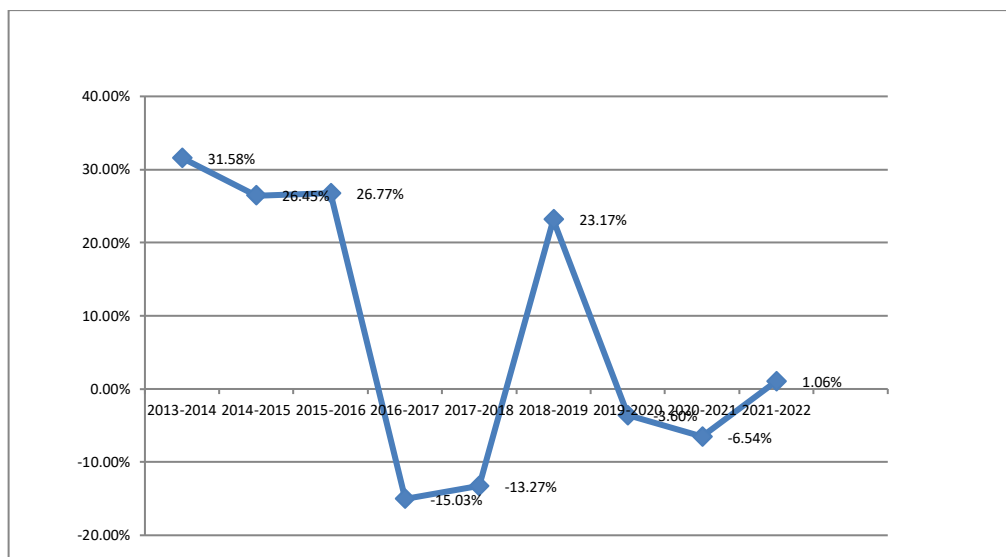
HASIL DAN PEMBAHASAN

Varians belanja dievaluasi melalui dua kategori, yaitu baik dan kurang baik. Kategori baik diberikan ketika realisasi belanja daerah kurang dari anggaran belanja yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang cermat dan efisien, di mana pemerintah daerah dapat mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Di sisi lain, kategori kurang baik diberikan apabila realisasi belanja daerah

melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ini dapat diartikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi belanja, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, peningkatan kebutuhan mendesak, atau kurangnya pengendalian pengeluaran. Kategori ini memberikan indikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menemukan solusi yang tepat dan memastikan bahwa belanja daerah dapat lebih terkendali.

Kriteria penilaian pertumbuhan belanja dinyatakan dalam dua kategori utama, yaitu naik dan turun. Kategori naik diberikan ketika pertumbuhan belanja menunjukkan nilai positif, mengindikasikan adanya peningkatan dibanding periode sebelumnya. Ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kebutuhan layanan publik, atau implementasi proyek pembangunan yang lebih besar. Peningkatan pertumbuhan belanja dalam kategori ini dapat diartikan sebagai respons positif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemenuhan target pembangunan daerah. Sebaliknya, kategori turun diberikan ketika pertumbuhan belanja menunjukkan nilai negatif, menandakan penurunan dibanding periode sebelumnya. Penurunan pertumbuhan belanja bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian kebijakan fiskal, penghematan anggaran, atau perubahan prioritas pembangunan. Kategori ini memberikan sinyal bahwa ada penurunan aktivitas pengeluaran, dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya.

Kriteria efisiensi belanja berdasarkan rasio efisiensi terbagi menjadi lima kategori utama, masing-masing memiliki rentang persentase yang menunjukkan tingkat efisiensi suatu belanja. Pertama, kategori tidak efisien diberikan jika rasio efisiensi melebihi 100%. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran melebihi nilai yang dianggarkan atau diharapkan. Kategori ini memberikan indikasi bahwa penggunaan dana tidak optimal dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Kategori selanjutnya adalah kurang efisien yang diberikan pada rentang rasio efisiensi antara 90-100%. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit ketidaksesuaian antara penggunaan dana dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kategori cukup efisien diberikan pada rentang 80-90% yang menandakan tingkat efisiensi yang memadai, tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan. Lebih lanjut, kategori efisien diberikan pada rentang 60-80%, hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran berada pada tingkat efisiensi yang baik dan sesuai dengan rencana anggaran. Terakhir, kategori sangat efisien diberikan jika rasio efisiensi kurang dari 60%. Ini mencerminkan tingkat efisiensi yang sangat baik, di mana pengeluaran dikelola dengan sangat baik dan optimal. Penggunaan dana pada tingkat ini mencapai hasil maksimal sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan kriteria efisiensi belanja ini, pemerintah daerah dapat secara sistematis mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, dan memastikan penggunaan dana yang efisien untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

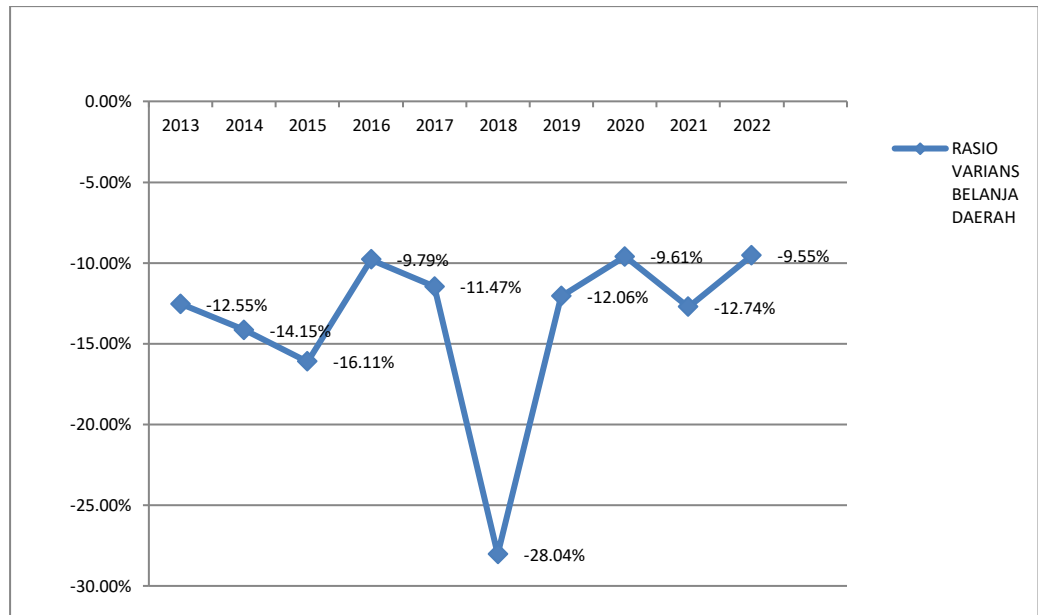


Gambar 3: Rasio Pertumbuhan Belanja

Table 1. Rata-Rata Rasio Belanja BPKK Aceh Barat Daya Tahun 2013-2022

No	Analisis Belanja	Hasil Penelitian
1.	Analisis Varians Belanja	-13,61%
2.	Analisis Pertumbuhan Belanja	7,84%
	Analisis Keserasian Belanja	
3.	a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja	63,12%
	b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja	24,14%
4.	Analisis Efisiensi Belanja	86,39%

Berdasarkan hasil analisis belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2013-2022 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 diketahui bahwa hasil analisis varians yaitu sebesar -13,61%, hasil analisis pertumbuhan belanja sebesar 7,84%, analisis belanja operasi terhadap total belanja sebesar 63,12%, analisis belanja modal terhadap total belanja sebesar 24,14% dan analisis efisiensi belanja sebesar 86,39%. Berdasarkan hasil analisis varians belanja pada BPKK Aceh Barat Daya tahun 2013-2022, didapatkan hasil rata-rata rasio yang bersaldo negatif sebesar -14,12%, artinya realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan interpretasi atas selisih antara anggaran dan realisasi yaitu, pertama apakah perbedaan tersebut menunjukkan adanya penghematan anggaran, dan kedua apabila perbedaan tersebut cukup besar, menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja menjadi kurang akurat, atau bisa terjadi karena adanya program-program yang tidak terlaksana. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa belanja daerah dapat dikatakan baik apabila selisih atau realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan.



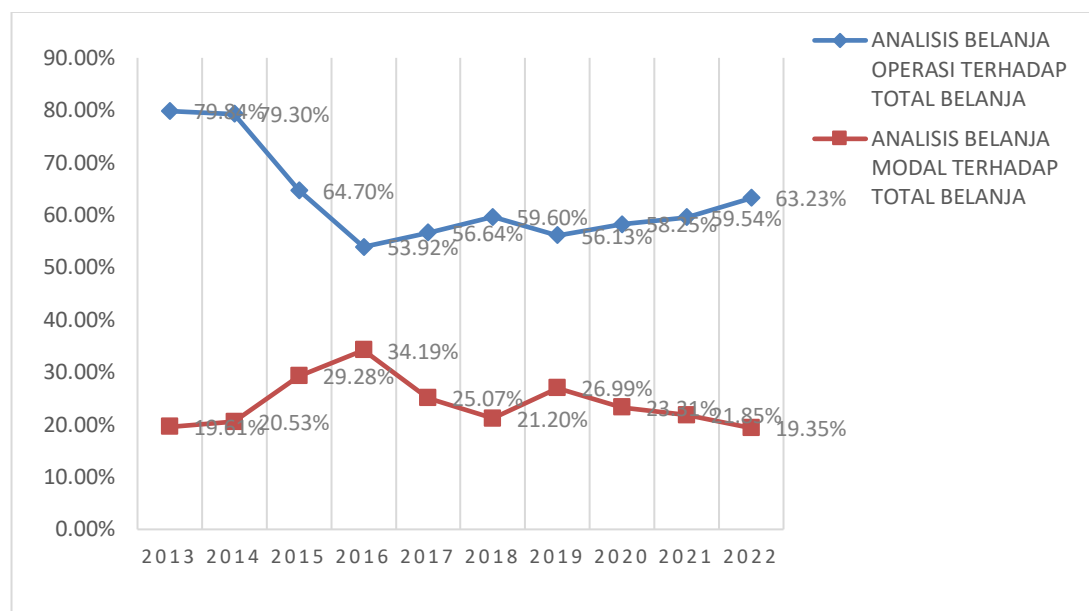
Gambar 4: Rasio Varians Belanja

Berdasarkan perhitungan dengan rasio varians belanja seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4, secara keseluruhan selisih antara anggaran dan realisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2013-2022 termasuk dalam kategori baik, karena rasio varians belanja daerah menunjukkan adanya selisih yang optimal, walaupun pada tahun 2018 rasio varians belanja menunjukkan angka yang cukup besar yaitu -28,04%. Rasio varians belanja yang besar tersebut terjadi karena rendahnya penyerapan anggaran pada tahun tersebut. Penyerapan anggaran yang rendah tersebut terjadi karena adanya rencana pinjaman yang tidak terealisasi dan adanya SILPA anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus tahun 2017 yang tidak terlaksana. Namun, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya terus berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini bisa dilihat dari tahun berikutnya dimana varians belanja menunjukkan nilai yang lebih kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silitonga (2022) dan Hakim et al. (2023) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan belanja BPKAD kota medan memiliki selisih disukai karena tidak adanya realisasi yang melebihi anggaran yang ditetapkan pada LRA belanja Kota Medan tahun 2017-2020.

Menganalisis pertumbuhan belanja bermanfaat dalam menilai perkembangan belanja selama beberapa tahun berturut-turut. Pertumbuhan belanja harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang sesuai untuk mempertahankan skenario fiskal yang seimbang. Kegagalan dalam mencapai keseimbangan ini dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan dan kesehatan fiskal daerah secara keseluruhan dalam jangka menengah. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja selama tahun 2013-2022, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya secara efektif mampu meningkatkan pertumbuhan belanja daerah selama 10 tahun terakhir. Terlihat dari rata-rata pertumbuhan belanja yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,84%, walaupun setiap tahun terjadi fluktuatif. Terjadinya fluktuatif dikarenakan adanya jumlah anggaran dan jumlah kegiatan yang berkurang atau bertambah selama tahun 2013-2022. Hasil penelitian ini didukung Mahmudi (2016) dan Cutler (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan belanja daerah yang positif disebabkan oleh realisasi belanja daerah tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, peningkatan pertumbuhan belanja secara signifikan terjadi pada tahun 2013-2014 sedangkan penurunan pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2016-2017. Peningkatan pertumbuhan belanja tahun 2013-2014 terjadi karena peningkatan penggunaan anggaran pada belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan penurunan

pertumbuhan belanja pada tahun 2016-2017 terjadi karena menurunnya penggunaan anggaran dari beberapa pos belanja pada belanja operasi yaitu pada belanja pegawai dan belanja hibah serta menurunnya penggunaan anggaran pada belanja modal. Walaupun terjadi penurunan, secara keseluruhan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya mampu meningkatkan pertumbuhan belanjanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwaningsih & Priyono (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan belanja pada pemerintah kota magelang tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dan positif.

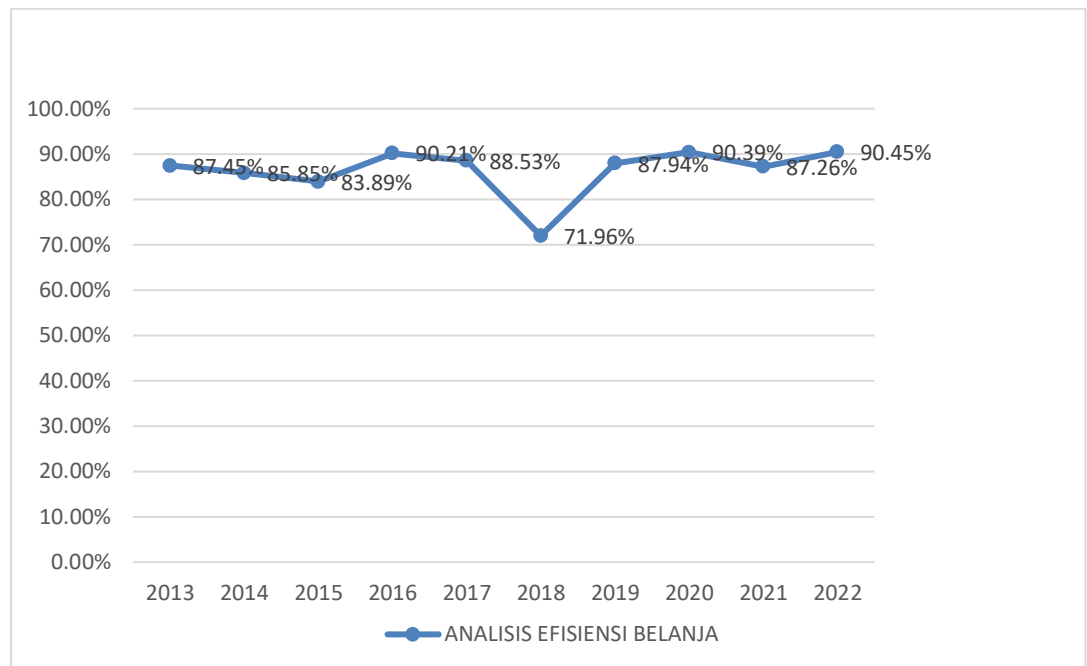


Gambar 5: Rasio Keseserasian Belanja

Analisis keserasian belanja dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja operasi dan belanja modal pada Gambar 5. Perbandingan dari rasio ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai porsi anggaran yang direalisasikan untuk belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan belanja rutin yang masa manfaatnya habis dalam satu tahun anggaran sehingga belanja ini hanya bisa digunakan dalam jangka pendek. Sedangkan belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun sehingga bisa digunakan dalam jangka menengah atau panjang. Jika belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan semakin tinggi, maka akan semakin kecil belanja modal yang digunakan untuk membiayai fasilitas sarana dan prasarana masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keserasian belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, didapatkan hasil rasio rata-rata belanja operasi selama tahun 2013-2022 sebesar 63,12% dan rasio rata-rata belanja modal sebesar 24,12%. Jika dilihat dari grafik keserasian belanja, selama 4 tahun secara berturut turut yaitu pada tahun 2019-2022, belanja operasi mengalami peningkatan sedangkan belanja modal mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi peningkatan pada belanja barang dan jasa yang digunakan pemerintah untuk menangani COVID 19. Oleh karena itu, banyak target indikator makro pembangunan yang sudah di rancang pada RPJMK tahun 2017-2022 kabupaten Aceh Barat Daya yang belum tercapai.

Selama tahun 2013-2022, sebanyak 63,12% dari total belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat digunakan untuk belanja operasi. Sedangkan sebanyak 24-14% digunakan untuk belanja modal. Oleh karena itu, terlihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya lebih memprioritaskan belanja yang masa manfaatnya habis dalam satu tahun dari pada belanja yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan Suhaedi (2019) yang menyatakan bahwa selama tahun 2014-2018 Kabupaten Lombok

Barat sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi dengan rata-rata sebesar 79,48%. Sedangkan untuk belanja modal sebesar 20,02%.



Gambar 6: Rasio Efisiensi Belanja

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien merupakan aspek penting bagi setiap pemerintah daerah. Efisiensi akan memberikan manfaat yaitu hasil yang optimal yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah serta mendorong daerah tersebut ke arah kemajuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengukur tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja pada Badan Pengelolaan Kabupaten Aceh Barat Daya, rata-rata rasio yang didapat selama tahun 2013-2022 yaitu sebesar 86,39%. Jika dilihat dari kriteria efisiensi belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya tergolong cukup efisien. Artinya, penggunaan anggaran belum menghasilkan output yang optimal dan masih belum efektif dalam pemanfaatan anggaran. Hal ini disebabkan karena proporsi yang lebih besar dari anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dialokasikan untuk belanja operasional, yang manfaatnya habis terpakai dalam waktu satu tahun, dibandingkan dengan belanja modal, yang manfaatnya ditujukan untuk pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, irigasi, dan aset lainnya. Gerarden & Stavins (2017) dan Mendrofa & Nur (2023) juga menyatakan bahwa efisiensi belanja yang kurang efisien terjadi karena proporsi belanja operasional yang lebih tinggi daripada belanja modal. Walaupun demikian, secara keseluruhan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya mampu melakukan penghematan terhadap anggarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriyanti et al. (2019), dimana hasil penelitiannya pada Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja menunjukkan hasil yang cukup efisien dengan hasil rata-rata 90,29%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis varians, pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi belanja pada badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh barat daya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari rasio varians belanja menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata -14,12%. Artinya, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya mampu memaksimalkan penghematan terhadap anggaran belanjanya, walaupun pada tahun 2018 terjadi selisih yang besar. Hasil perhitungan dari rasio

pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata sebesar 7,84%. Artinya, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya mampu meningkatkan pertumbuhannya sehingga menghasilkan pertumbuhan belanja yang positif. Hasil perhitungan dari rasio keserasian belanja menunjukkan hasil belanja operasi dengan rata-rata 63,12%, sedangkan untuk belanja modal sebesar 24,14%. Dengan demikian, selama 2013-2022 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Barat Daya lebih memprioritaskan belanja daerahnya pada belanja rutin daripada belanja pembangunan. Hasil perhitungan dari rasio efisiensi belanja menunjukkan hasil rata-rata sebesar 86,39%, yang artinya jika dilihat dari kriteria efisiensi belanja termasuk kedalam kategori cukup efisien. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan yaitu BPKK Aceh Barat Daya seharusnya lebih memprioritaskan belanja modal karena belanja modal berkontribusi pada perolehan aset yang manfaatnya lebih dari satu tahun serta dapat meningkatkan infrastruktur dan aset daerah lainnya sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi, dengan memasukkan alat analisis tambahan untuk menilai kinerja keuangan dan mempertimbangkan berbagai SKPK.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akhmadii, M. H., & Sumardjoko, I. (2017). *The Implications of Local Government Spending Efficiency on the Regional Economic Performance*. In *2nd International Conference on Indonesian Economy and Development (ICIED 2017)*, 11-15, Atlantis Press.
- [2] Amelia, S. A. (2022). Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran (LRA) badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Sukabumi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(1), 76-84.
- [3] Apriyanti, F. W., Tiara, S., & Dewi, R. S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2(2), 1289-1298.
- [4] Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1).
- [5] Chrisman, J. J. (2019). Stewardship theory: Realism, relevance, and family firm governance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 43(6), 1051-1066.
- [6] Cutler, D., Skinner, J. S., Stern, A. D., & Wennberg, D. (2019). Physician beliefs and patient preferences: a new look at regional variation in health care spending. *American Economic Journal: Economic Policy*, 11(1), 192-221.
- [7] Fatmahwati, S. (2021). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada BPPKAD Kota Surakarta (2018-2020) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [8] Gerarden, T. D., Newell, R. G., & Stavins, R. N. (2017). Assessing the energy-efficiency gap. *Journal of economic literature*, 55(4), 1486-1525.
- [9] Hakim, M. K., Nasution, A. I. L., & Nurwani, N. (2023). Analysis of Direct Expenditure Budget Realization Reports in Order to Measure Effectiveness and Efficiency at Bkad Medan City. *Jurnal Ekonomi*, 12(3), 411-418.
- [10] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.
- [12] Kannapadang, D. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja. *Paulus Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- [13] Kusumawardani, N., Susi, S., & Sukmasari, D. (2023). Leadership entrepreneur dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan BUMDes: Innovation capability sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 5(1), 39-52.
- [14] Labi, A. (2019). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 5(1), 1355-1370.
- [15] Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- [16] Mendrofa, D. Y., & Nur, M. A. (2023). Analisis Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 1058-1069.

- [17] Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2011). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1).
- [18] Palimbong, S. M. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 2(2), 207-226.
- [19] Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Accountability*, 6(1), 45-56.
- [20] Purwaningsih, E., & Priyono, N. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015-2019. *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(1), 24-38.
- [21] Saputra, E., Latif, I. N., & Haryadi, R. M. (2020). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, (9) 271-281.
- [22] Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: Balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650-676.
- [23] Silitonga, P. V. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 4(1), 1-17.
- [24] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- [25] Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63-78.